



LAPORAN KEUANGAN

Kantor Camat Bika Tahun Anggaran 2022

Terdiri dari :

NERACA

Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Operasional

Laporan Perubahan Ekuitas

Catatan atas Laporan Keuangan

PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU

2022

KATA PENGANTAR

Kecamatan Bika adalah salah satu Entitas Akuntansi di bawah Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun 2022. Salah satu pelaksanaannya adalah dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Kecamatan Bika mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam Pemerintahan. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pengguna laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan Daerah Kecamatan Bika. Disamping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).

Pengguna Anggaran

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Paulinus Totong', with a large, stylized initial 'P' and 'T'.

PAULINUS TOTONG, S.Sos., M.A.P
NIP : 19820827 200902 1 003



PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU

KECAMATAN BIKA

Alamat : Jalan Raya Bika Nomor 10

Pernyataan Tanggung Jawab

Laporan Keuangan Kecamatan Bika yang terdiri dari: Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan per 31 Desember Tahun Anggaran 2022 sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan Kecamatan Bika telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Pengguna Anggaran

PAULINUS TOTONG, S.Sos., M.A.P
NIP : 19820827 200902 1 003

PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU
KECAMATAN BIKA
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN
31 DESEMBER 2022 DAN 2021

(dalam rupiah)

NO.	U R A I A N	Anggaran 2022	Realisasi 2022	(%)	Realisasi 2021
1	PENDAPATAN				
2	PENDAPATAN ASLI DAERAH				
3	Pendapatan Pajak Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Pendapatan Retribusi Daerah			0,00	0,00
5	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan			0,00	
6	Lain-lain PAD yang sah			0,00	0,00
7	Jumlah Pendapatan Asli Daerah (3 s/d 6)	0,00	0,00	0,00	0,00
8					
9	PENDAPATAN TRANSFER				
10	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT-DANA PERIMBANGAN				
11	Dana Bagi Hasil Pajak	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Dana Alokasi Umum	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Dana Alokasi Khusus	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Jumlah Pendapatan Transfer Dana Perimbangan	0,00	0,00	0,00	0,00
16					
17	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT-LAINNYA				
18	Dana Otonomi Khusus	0,00	0,00	-	0,00
19	Dana Penyesuaian	0,00	0,00	-	0,00
20	Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah	0,00	0,00	0,00	0,00
21					
22	TRANSFER PEMERINTAH PROVINSI				
23	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Pendapatan Bagi Hasil Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Jumlah Transfer Pemerintah Provinsi (23 s/d 24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Total Pendapatan Transfer (15 + 20 + 25)	0,00	0,00	-	0,00
27					
28	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH				
29	Pendapatan Hibah	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Pendapatan Dana Darurat	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Pendapatan Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Jumlah Lain-lain Pendapatan yang Sah (29 s/d 31)	0,00	0,00	0,00	0,00
33	JUMLAH PENDAPATAN (7 + 26 + 32)	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00
34					
35	BELANJA				
36	BELANJA OPERASI				
37	Belanja Pegawai	1.045.544.640,00	1.050.801.982,00	100,50	871.123.370,00
38	Belanja Barang dan Jasa	532.381.520,00	531.824.648,00	99,90	375.402.980,00
39	Bunga				
40	Subsidi				
41	Hibah				
42	Bantuan Sosial				
43	Jumlah Belanja Operasi (37 s/d 42)	1.577.926.160,00	1.582.626.630,00	100,30	1.246.526.350,00
44					
45	BELANJA MODAL				
46	Belanja Tanah				42.810.000,00
47	Belanja Peralatan dan Mesin				
48	Belanja Gedung dan Bangunan			0,00	
49	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan				
50	Belanja Aset Tetap Lainnya				
51	Belanja Aset Lainnya				
52	Jumlah Belanja Modal (46 + 51)	0,00	0,00	#DIV/0!	42.810.000,00
	JUMLAH BELANJA	1.577.926.160,00	1.582.626.630,00	100,30	1.289.336.350,00
66	SURPLUS/DEFISIT (33 - 57 - 64)	-1.577.926.160,00	-1.582.626.630,00	100,30	-1.289.336.350,00



PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU
KECAMATAN BIKA
LAPORAN OPERASIONAL
PER 31 DESEMBER 2022 DAN 2021

Uraian	Reff	2022	2021
<u>KEGIATAN OPERASIONAL</u>			
<u>PENDAPATAN</u>			
PENDAPATAN ASLI DAERAH	7.5.1.1		
Pendapatan Pajak Daerah	7.5.1.1.1	0,00	
Pendapatan Retribusi Daerah	7.5.1.1.2	0,00	
Pendapatan Hasil Pengolahan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	7.5.1.1.3	0,00	
Lain-Lain PAD yang Sah	7.5.1.1.4	0,00	
Jumlah Pendapatan Asli Daerah		0,00	0,00
PENDAPATAN TRANSFER	7.5.1.2		
TRANSFER PEMERINTAH PUSAT-DANA PERIMBANGAN			
Dana Bagi Hasil Pajak		0,00	
Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam		0,00	
Dana Alokasi Umum		0,00	
Dana Alokasi Khusus		0,00	
Jumlah Pendapatan Transfer Dana Perimbangan		0,00	0,00
TRANSFER PEMERINTAH PUSAT LAINNYA			
Dana Otonomi Khusus			
Dana Insentif Desa (DID)		-	0
Dana Desa		-	0
Dana Penyesuaian		0,00	
Jumlah Pendapatan Transfer Lainnya		0,00	0,00
TRANSFER PEMERINTAH PROVINSI			
Pendapatan Bagi Hasil Pajak		0,00	
Pendapatan Dana BOS		0	0
Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi		0,00	0,00
BANTUAN KEUANGAN			
Bantuan Keuangan dari Pemerintah Provinsi			
Jumlah Bantuan Keuangan		-	-
Jumlah Pendapatan Transfer		0,00	0,00
LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH	7.5.1.3		
Pendapatan Hibah BOS		-	
Pendapatan Hibah Provinsi		-	
Lain-Lain Pendapatan		0,00	
Jumlah Lain-lain Pendapatan Yang Sah		0,00	0,00
JUMLAH PENDAPATAN		0,00	0,00
BEBAN OPERASI	7.5.2.1		
Beban Pegawai	7.5.2.1.1	1.076.613.982,00	871.123.370,00
Beban Persediaan	7.5.2.1.2	186.851.000,00	114.708.000,00
Beban Jasa	7.5.2.1.3	165.680.248,00	133.738.380,00
Beban Pemeliharaan	7.5.2.1.4	-	
Beban Perjalanan Dinas	7.5.2.1.5	134.600.000,00	92.650.000,00
Beban Barang yang Diserahkan pada Pihak Ketiga/Masyarakat	7.5.2.1.6		
Beban Uang yang Diserahkan pada Pihak Ketiga/Masyarakat	7.5.2.1.7	44.000.000,00	35.000.000,00
Beban Subsidi	7.5.2.1.8	-	
Beban Penyisihan Piutang	7.5.2.1.9	-	
Beban Penyusutan	7.5.2.1.10	118.601.263,07	118.561.430,43
Beban Amortisasi	7.5.2.1.11	-	
Beban Hibah	7.5.2.1.12	-	
Beban Bansos	7.5.2.1.13	-	
Beban Beasiswa	7.5.2.1.14	-	
Beban Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimtek PNS	7.5.2.1.15	-	
Beban Ekstrakomptabel	7.5.2.1.16	-	2.670.000,00
Beban Lain-lain	7.5.2.1.17	-	
Jumlah Beban Operasi		1.726.346.493,07	1.368.451.180,43

			0
BEBAN TRANSFER	7.5.2.2		
Beban Transfer Bagi Hasil Pajak			
Beban Transfer Bagi Hasil Retribusi			
Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah Lainnya			
Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Desa			
Beban Transfer Keuangan Lainnya			
Jumlah Beban Transfer		0,00	0,00
JUMLAH BEBAN DAN TRANSFER		1.726.346.493,07	1.368.451.180,43
JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI OPERASI	07:05:03	-1.726.346.493,07	-1.368.451.180,43
SURPLUS NON OPERASIONAL	7.5.4.1	0,00	0,00
Surplus Penjualan Aset Non Lancar			
Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang			
Surplus Dari Kegiatan Non Operasional Lainnya			
Jumlah Surplus Non Operasional		0,00	0,00
DEFISIT NON OPERASIONAL	7.5.4.2		
Defisit Penjualan Aset Non Lancar			
Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang			
Defisit Dari Kegiatan Non Operasional Lainnya			
Jumlah Defisit Non Operasional		0,00	0,00
JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL		0,00	0,00
SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA		-1.726.346.493,07	-1.368.451.180,43
PENDAPATAN LUAR BIASA	07:05:05		
Pendapatan Luar Biasa		0	
Jumlah Pendapatan Luar Biasa		0	0
BEBAN LUAR BIASA			
Beban Luar Biasa			
Jumlah Beban Luar Biasa		0,00	0,00
POS LUAR BIASA		-	-
SURPLUS/DEFISIT-LO	07:05:06	-1.726.346.493,07	-1.368.451.180,43



KABUPATEN KAPUAS HULU
N E R A C A
KECAMATAN BIKA
Per 31 Desember Tahun 2022 dan Tahun 2021

(dalam rupiah)

U r a i a n	Jumlah		Kenaikan (Penurunan)	
	Tahun 2022	Tahun 2021	Jumlah	%
ASET	2.376.422.314,45	1.646.772.888,86	729.649.425,59	44,31
ASET LANCAR	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
Kas	0,00	0,00	0,00	0,00
Kas di Kas Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
Kas di Bendahara Penerimaan	0,00	0,00	0,00	0,00
Kas di Bendahara Pengeluaran	0,00	0,00	0,00	0,00
Kas di BLUD	0,00	0,00	0,00	0,00
Kas Lainnya - Sisa Dana BOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Kas Lainnya FKTP	0,00	0,00	0,00	0,00
Kas Lainnya - Sisa Dana BOSDA	0,00	0,00	0,00	0,00
Kas Lainnya - Jasa Giro	0,00	0,00	0,00	0,00
Piutang	0,00	0,00	0,00	0,00
Piutang Pajak Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
Piutang Retribusi	0,00	0,00	0,00	0,00
Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yg dipisahkan	0,00	0,00	0,00	0,00
Piutang Transfer Pemerintah Pusat	0,00	0,00	0,00	0,00
Piutang Transfer Pemda Lainnya (Bagi Hasil Provinsi)	0,00	0,00	0,00	0,00
Piutang Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
Piutang BLUD	0,00	0,00	0,00	0,00
Piutang Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
Penyisihan Piutang	0,00	0,00	0,00	0,00
Persediaan	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
Jumlah	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
INVESTASI JANGKA PANJANG	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTASI NON PERMANEN				
Dana Bergulir	0,00	0,00	0,00	0,00
Penyisihan Dana Bergulir	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTASI PERMANEN				
Penyertaan Modal pada PT. Bank KALBAR	0,00	0,00		
Penyertaan Modal pada PDAM Kab. Kapuas Hulu	0,00	0,00		
Penyertaan Modal pada Perumda Uncak Kapuas	0,00	0,00		
Penyertaan Modal pada PT. JAMKRIDA	0,00	0,00		
Penyertaan Modal pada BUMD PT. Uncak Kapuas Mandiri	0,00	0,00		
Jumlah	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah	0,00	0,00	0,00	0,00
ASET TETAP	4.961.036.484,74	4.065.040.860,72	895.995.624,02	22,04
Tanah	307.115.000,00	307.115.000,00	0,00	0,00
Tanah	307.115.000,00	307.115.000,00	0,00	0,00
Peralatan dan Mesin	536.400.418,90	548.389.984,90	-11.989.566,00	(2,19)
Alat-alat Berat	0,00	0,00	0,00	0,00
Alat-alat Angkutan	267.235.187,18	271.224.753,18	-3.989.566,00	(1,47)
Alat-alat Pengolah Air	-	-		
Alat Bengkel dan alat ukur	-	-	0,00	0,00
Alat Pertanian dan Peternakan	-	-	0,00	0,00
Alat-alat Kantor dan Rumah Tangga	146.011.122,73	146.011.122,73	0,00	0,00
Komputer	64.981.435,73	72.981.435,73	-8.000.000,00	(10,96)
Alat Studio dan Alat Komunikasi	56.672.673,27	56.672.673,27	0,00	0,00
Alat-alat Kedokteran	0,00	0,00	0,00	0,00
Alat Laboratorium	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00
Alat Rambu-rambu	-	-	0,00	0,00
Alat Peraga dan Olah Raga	-	-	0,00	0,00
Alat Keamanan	0,00	0,00	0,00	0,00
Gedung dan Bangunan	2.539.307.431,86	1.631.322.241,84	907.985.190,02	35,76
Bangunan Gedung	2.539.307.431,86	1.631.322.241,84	907.985.190,02	35,76
Bangunan Monumen	0,00	0,00	0,00	0,00
Jalan, Irigasi dan Jaringan	1.578.213.633,98	1.578.213.633,98	0,00	0,00
Jalan dan Jembatan	1.523.560.394,93	1.523.560.394,93	0,00	0,00
Bangunan Air (Irigasi)	54.653.239,05	54.653.239,05	0,00	0,00
Instalasi	0,00	0,00	0,00	0,00
Jaringan			0,00	0,00
Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
Buku dan Perpustakaan	0,00	0,00	0,00	0,00
Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan	-	-	0,00	0,00
Hewan / Ternak dan Tanaman	0,00	0,00	0,00	0,00
Konstruksi Dalam Pengerjaan	0,00	0,00	0,00	0,00
Konstruksi Dalam Pengerjaan	0,00	0,00	0,00	0,00
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	-2.584.614.170,29	-2.418.267.971,86	-166.346.198,43	6,88
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	(2.584.614.170,29)	(2.418.267.971,86)	-166.346.198,43	6,88
Jumlah	2.376.422.314,45	1.646.772.888,86	729.649.425,59	44,31
ASET LAINNYA	77.888.101,77	77.888.101,77	0,00	0,00
Tagihan Penjualan Angsuran	0,00	0,00	0,00	0,00
Tagihan Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
Penyisihan Tuntutan Ganti Rugi	0,00	0,00		
Kemitraan Dengan Pihak Ketiga			0,00	0,00
Aset Tak Berwujud	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortisasi Aset Tak Berwujud	0,00	0,00	0,00	
Aset Lain-Lain	77.888.101,77	77.888.101,77	0,00	0,00
Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain	-77.888.101,77	-77.888.101,77		
Jumlah	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
Jumlah	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
JUMLAH ASET	2.376.422.314,45	1.646.772.888,86	729.649.425,59	44,31

(dalam rupiah)

U r a i a n	Jumlah		Kenaikan (Penurunan)	
	Tahun 2022	Tahun 2021	Jumlah	%
KEWAJIBAN	25.812.000,00	693.400,00	25.118.600,00	0,00
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	25.812.000,00	693.400,00	25.118.600,00	0,00
Utang Peruntukan Pada Pihak Ketiga (PFK)	0,00		0,00	0,00
Pendapatan Diterima Dimuka/Pendapatan Yang Ditangguhkan	0,00	0,00	0,00	0,00
Utang Belanja	25.812.000,00	693.400,00		
Utang Jangka Pendek Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah	25.812.000,00	693.400,00	0,00	0,00
KEWAJIBAN JANGKA PANJANG	25.812.000,00	693.400,00	25.118.600,00	0,00
Utang Dalam Negeri	0,00	0,00	0,00	0,00
Utang Luar Negeri	0,00	0,00	0,00	0,00
Utang Jangka Panjang Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah	25.812.000,00	693.400,00	0,00	0,00
EKUITAS DANA	2.350.610.314,45	1.646.079.488,86	704.530.825,59	42,80
Jumlah	2.350.610.314,45	1.646.079.488,86	704.530.825,59	42,80
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA	2.376.422.314,45	1.646.772.888,86	729.649.425,59	44,31



PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU
KECAMATAN BIKA
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
PER 31 DESEMBER 2022 DAN 2021

NO.	URAIAN	Ref	PER 31 DES 2022	PER 31 DES 2021
1				
2	EKUITAS AWAL	7.3.6.1	1.646.079.488,86	1.725.194.319,29
3	SURPLUS/ DEFISIT LO	7.3.6.2	(1.726.346.493,07)	(1.368.451.180,43)
4	DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/	7.3.6.3	-	
5	KESALAHAN MENDASAR :	7.3.6.3.1	-	
6	KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS	7.3.6.3.2	-	
7	Koreksi Kas Daerah	7.3.6.3.3	-	
8	Koreksi Kas di Bendahara	7.3.6.3.4	-	
9	Koreksi Kas Lainnya	7.3.6.3.5	-	
10	Koreksi Piutang	7.3.6.3.6	-	
11	Koreksi Penyisihan Piutang	7.3.6.3.7	-	
12	Koreksi Nilai Persediaan	7.3.6.3.8	-	
13	Koreksi Pendapatan Diterima Dimuka	7.3.6.3.9	-	
14	Koreksi Investasi Jangka Panjang	7.3.6.3.10	-	
15	Koreksi Aset Tetap	7.3.6.3.11	895.995.624,02	
	Mutasi Masuk		925.295.624,02	
	Mutasi Keluar		(29.300.000,00)	
	Koreksi Masuk (atas pencatatan)			
	Koreksi Keluar (atas pencatatan)			
16	Koreksi Penyusutan	7.3.6.3.12	(47.744.935,36)	
	Mutasi Masuk		-82.936.404,11	
	Mutasi Keluar		22.900.000,00	
	Koreksi Masuk (atas pencatatan Kapitalisasi)		12.291.468,75	
	Koreksi Keluar (atas pencatatan)			
17	Koreksi Aset lainnya	7.3.6.3.13	-	
	Mutasi Masuk			
	Mutasi Keluar			
	Koreksi Masuk (atas pencatatan)			
	Koreksi Keluar (atas pencatatan)			
18	Koreksi Penyisihan Ganti Rugi	7.3.6.3.14	-	
19	Koreksi Amortisasi	7.3.6.3.15	-	
20	Koreksi Kewajiban jangka Pendek	7.3.6.3.16	-	
21	Koreksi Kewajiban jangka Panjang	7.3.6.3.17	-	
22	RK-PPKD		1.582.626.630,00	1.289.336.350
	EKUITAS AKHIR	7.7.4	2.350.610.314,45	1.646.079.488,86

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan SKPD

Terlaksananya good governance merupakan prasyarat bagi setiap pemerintah untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan untuk mencapai tujuan serta cita-cita bangsa dan negara. Dalam rangka itu diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur dan legitimate sehingga penyelenggara pemerintah dan Pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab.

Untuk itu Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Menteri Dalam Menteri Nomor 13 Tahun 2006 dan telah direvisi dengan Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, yang didalamnya mengatur tentang kegiatan Akuntansi dan Pelaporan Organisasi Perangkat Daerah. Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang penerapan akuntansi pemerintahan berbasis akrual pada Pemerintah Daerah, berimplikasi pada perubahan sistem penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah. OPD sebagai entitas akuntansi yang sebelumnya terbiasa dengan pencatatan berbasis kas harus merubah kebiasaan tersebut dan wajib menyajikan laporan keuangan berbasis akrual mulai tahun 2015. Dengan adanya perubahan sistem menjadi akrual, proses pengakuan dan pencatatan mengalami perubahan. Pada basis kas pengakuan dan pencatatan terjadi transaksi berdasar hanya mengandalkan pada saat kas masuk atau kas keluar, sedangkan pada basis akrual pengakuan pencatatan adanya beban dan hak (pendapatann) tidak hanya memperhatikan pada saat kas diterima atau dibayar oleh Bendahara Pengeluaran, namun pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi dan diakui.

Pada basis kas unsur laporan keuangan OPD terdiri dari: Neraca, LRA (Laporan Realisasi Anggaran) dan CALK (Catatan Atas Laporan Keuangan). Sedangkan pencatatan berbasis akrual laporan keuangan OPD terdiri dari: Neraca, Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), dan Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK).

Laporan keuangan menyediakan informasi mengenai sumber dan penggunaan sumber daya keuangan/ekonomi, Sisa lebih/kurang pelaksanaan anggaran, saldo anggaran lebih, aset, kewajiban dan ekuitas Kecamatan Bika. Sehingga dapat bermanfaat bagi para pengguna dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan ekonomi, sosial, maupun politik guna memenuhi tujuan-tujuan antara lain :

- a. Menyediakan informasi mengenai posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas;
- b. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas;
- c. Menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya ekonomi;

- d. Menyediakan informasi mengenai ketaatan realisasi terhadap anggarannya;
- e. Menyediakan informasi mengenai potensi pemerintah membiayai penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
- f. Menyediakan informasi yang berguna untuk mengevaluasi kemampuan entitas pelaporan dalam mendanai aktifitasnya.

- **Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan SKPD**

- (1) UU No. 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- (2) UU No. 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- (3) Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- (4) PP No. 71 tahun 2010 tentang Stándar Akuntansi Pemerintahan;
- (5) PP No. 21 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- (6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengolahan Keuangan Daerah;
- (7) Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- (8) Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 9 ahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2021
- (9) Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 9 Tahun 2021 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2021
- (10) Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 55 Tahun 2021 tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2021
- (11) Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 22 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu;
- (12) Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 87 tahun 2020 tentang Standar Biaya dan Petunjuk Teknis Pelaksanaan APBD Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2021
- (13) Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 86 tahun 2021 tentang Ketentuan dan Standar Biaya Perjalanan Dinas Dalam Negeri atas Beban APBD Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2021
- (14) Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 53 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 48 Tahun 2018 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu;

1.4 Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan

Catatan atas Laporan Keuangan Kecamatan Bika merupakan penjelasan naratif atau rincian dari angka yang tertera dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional dan Laporan Perubahan Ekuitas. Catatan atas Laporan Keuangan Kecamatan Bika mencakup informasi tentang Kebijakan Akuntansi yang dipergunakan dan informasi lain yang diharuskan dan dianjurkan untuk diungkapkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta ungkapan-ungkapan yang diperlukan untuk menghasilkan penyajian laporan keuangan yang wajar

Sistematika penulisan catatan atas laporan keuangan tahun anggaran 2022 meliputi hal-hal berikut

I. PENDAHULUAN

- 1.1 Informasi Umum
- 1.2 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan keuangan
- 1.3 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan
- 1.4 Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan

II. EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD

- 2.1 Ekonomi Makro
- 2.2 Kebijakan Keuangan
- 2.3 Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD

III. IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

- 3.1 Ikhtisar Realisasi pencapaian Target Kinerja Keuangan
- 3.2 Hambatan dan Kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah
Ditetapkan

IV. KEBIJAKAN AKUNTANSI

- 4.1 Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan Keuangan Daerah
- 4.2 Basis Akuntansi yang mendasari Penyusunan Laporan Keuangan
- 4.3 Basis pengukuran yang mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

- 4.4 Penerapan Kebijakan Akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam Standar Akuntansi Pemerintah.

V. PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

5.1 Penjelasan Laporan Realisasi Anggaran (LRA)

5.1.1 Pendapatan – LRA

5.1.2 Belanja

5.2 Penjelasan Neraca

5.2.1 Aset

5.2.2 Kewajiban

5.2.3 Ekuitas Dana

5.3 Penjelasan Laporan Operasional

5.3.1 Pendapatan LO

5.3.2 Beban

5.4 Penjelasan Laporan Perubahan Ekuitas

- 5.5 Pengungkapan atas pos-pos aset dan kewajiban yang timbul sehubungan dengan penerapan basis akrual atas pendapatan dan belanja dan rekonsiliasinya dengan penerapan basis kas.

VI. PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN

VII. PENUTUP

BAB II

EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA

- **Ekonomi Makro**

Harga satuan belanja barang pada RKA / DPA Kecamatan Bika Kabupaten Kapuas Hulu Tahun Anggaran 2022 disusun mengacu kepada Pedoman Harga Satuan Barang dan Jasa Kebutuhan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu tentang Standar Biaya dan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2022. Pada sepertiga tahun terakhir, tahun anggaran dilaksanakan Perubahan Anggaran (DPPA-OPD). Hal ini dilaksanakan mengingat setelah berjalannya proses kegiatan terdapat banyak penyesuaian dalam beberapa pos ketidaktepatan dalam perkiraan perhitungan di awal pembuatan DPA awal tahun anggaran.

Dalam perkembangannya, pranata ekonomi memelihara kelangsungan sistem nilainya tidak pernah lepas dari keterkaitan dengan ruang-ruang sosial lainnya baik itu pranata politik, pendidikan, kemasyarakatan atau keluarga maupun agama. Disini dapat diamati karakteristik hubungan pranata sosial dalam masyarakat terkini yang cenderung bersifat kompleks, fungsional, independen, serta memiliki ketergantungan yang tinggi sehingga mampu menjabarkan sebuah pola hubungan yang bersifat sistemik konsekuensi dunia pendidikan dengan sektor ekonomi masyarakat Indonesia memiliki hubungan yang erat, di mana kedua komponen lembaga tersebut merupakan aset negara yang memerlukan pengelolaan secara hati-hati dan cermat.

Secara lebih khusus hubungannya menyangkut modal fisik, tenaga kerja dan kemajuan teknologi yang menjadi tiga faktor pokok sebagai masukan (input) dalam produksi pendapatan nasional. Semakin besar jumlah tenaga kerja (yang berarti laju pertumbuhan penduduk tinggi) semakin besar pendapatan nasional dan semakin tinggi pertumbuhan ekonomi.

Dengan demikian infrastruktur dan sarana-sarana yang melayani kehidupan masyarakat kini beralih tangan menjadi wewenang negara. Secara lebih luas otomatis perubahan struktur sosial politik berdampak bergesernya format hubungan antara lembaga sosial ekonomi dengan lembaga pendidikan. Oleh sebab itu, kebijakan pemerintah untuk membangun pilar-pilar kesejahteraan ekonomi masyarakat akan tetap berkorelasi kuat dengan praktik pendidikan sebagai pencetak operator pelaksana transformasi kemajuan dan pertumbuhan ekonomi.

Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD Kecamatan Bika

Dari 02 (dua) Program setelah Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang dilaksanakan Satuan Kerja perangkat Daerah Kecamatan Bika Tahun Anggaran 2022 masing-masing Indikator Pencapaian Target Kinerja, sebagai berikut

**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN/KOTA**

Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
Fasilitasi Kunjungan Tamu
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan
Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN

Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan
Pembangunan di Desa
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah
Kecamatan

BAB III
IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN SKPD

Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan

Kecamatan Bika memiliki 2 (dua) Program yang dilaksanakan satuan kerja perangkat daerah Kecamatan Bika tahun anggaran 2022 disampaikan tingkat Pencapaian Target Kinerja sebagai berikut secara keseluruhan dengan anggaran Rp.1.577.926.160,00 penyerapan realisasi anggaran Rp. 1.582.626.630,00 atau 100,30% adapun penyerapan anggaran adalah sebagai berikut :

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Pencapaian kinerja keuangan dari prokgam penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten kota dengan anggara Rp.1.499.426.760,00 pencapaian target sebesar Rp.1.504.127.230,00 atau 100,31% terdiri dari kegiatan :

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota			
	Anggaran	Realisasi	%
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	4.330.000	4.330.000	
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	1.350.000	1.350.000,00	
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	2.980.000	2.980.000,00	

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota			
	Anggaran	Realisasi	%
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	912.624.640	917.881.982	100,58
Belanja Gaji Pokok PNS	470.753.890	469.272.500,00	99,69
Belanja Tunjangan Keluarga PNS	58.563.553	58.406.466,00	99,73
Belanja Tunjangan Jabatan PNS	57.374.500	57.130.000,00	99,57
Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	7.657.250	7.630.000,00	99,64
Belanja Tunjangan Beras PNS	28.493.649	28.388.640,00	99,63
Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	1.236.228	1.253.690,00	101,41
Belanja Pembulatan Gaji PNS	4.201	4.157,00	98,95
Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	30.555.090	30.312.010,00	99,20
Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	974.780	971.225,00	99,64
Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	2.924.359	2.913.694,00	99,64
Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	254.087.140	261.599.600,00	102,96

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota			
	Anggaran	Realisasi	%
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	132.920.000,00	132.920.000	100,00
Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	132.920.000,00	132.920.000,00	100,00

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota			
	Anggaran	Realisasi	%
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	4.870.000,00	4.870.000	100,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	1.500.000,00	1.500.000,00	100,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	3.370.000,00	3.370.000,00	100,00

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota			
	Anggaran	Realisasi	%
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4.110.000,00	4.110.000	100,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	4.110.000,00	4.110.000,00	100,00

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota			
	Anggaran	Realisasi	%
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	41.066.400,00	41.066.400	100,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	20.926.400,00	20.926.400,00	100,00
Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	6.340.000,00	6.340.000,00	100,00
Belanja Pakaian Batik Tradisional	7.200.000,00	7.200.000,00	100,00
Belanja Pakaian Olahraga	6.600.000,00	6.600.000,00	100,00

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota			
	Anggaran	Realisasi	%
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	13.192.800,00	13.177.800	99,89
Belanja Bahan-Isi Tabung Gas	1.815.000,00	1.800.000,00	99,17
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	11.377.800,00	11.377.800,00	100,00

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota			
	Anggaran	Realisasi	%
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	17.633.800,00	17.633.800	100,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	53.000,00	53.000,00	100,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	17.580.800,00	17.580.800,00	100,00

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota			
	Anggaran	Realisasi	%
Fasilitasi Kunjungan Tamu	43.208.000,00	43.208.000	100,00
Belanja Makanan dan Minuman Rapat	27.984.000,00	27.984.000,00	100,00
Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	15.224.000,00	15.224.000,00	100,00

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota			
	Anggaran	Realisasi	%
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	80.550.000,00	80.550.000	100,00
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	80.550.000,00	80.550.000,00	100,00

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota			
	Anggaran	Realisasi	%
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.450.000,00	3.450.000	100,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	3.450.000,00	3.450.000,00	100,00

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota			
	Anggaran	Realisasi	%
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	6.600.000,00	6.269.008	94,98
Belanja Tagihan Air	2.400.000,00	2.400.000,00	100,00
Belanja Tagihan Listrik	4.200.000,00	3.869.008,00	92,12

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota			
	Anggaran	Realisasi	%
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	212.171.120,00	211.970.240	99,91
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	14.820.000,00	14.820.000,00	100,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	11.145.600,00	11.145.600,00	100,00
Belanja Jasa Tenaga Administrasi	148.800.000,00	148.800.000,00	100,00
Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	5.952.000,00	5.952.000,00	100,00
Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	357.120,00	267.840,00	75,00
Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	446.400,00	334.800,00	75,00
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	30.650.000,00	30.650.000,00	100,00

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota			
	Anggaran	Realisasi	%
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	22.700.000,00	22.690.000	99,96
Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	8.600.000,00	8.590.000,00	99,88
Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	12.300.000,00	12.300.000,00	100,00
Belanja Jasa Tenaga Keamanan	1.800.000,00	1.800.000,00	100,00

Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan			
	Anggaran	Realisasi	%
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	11.099.400,00	11.099.400	100,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	1.835.000,00	1.835.000,00	100,00

Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	1.362.400,00	1.362.400,00	100,00
Belanja Makanan dan Minuman Rapat	4.952.000,00	4.952.000,00	100,00
Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	2.950.000,00	2.950.000,00	100,00

Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan			
	Anggaran	Realisasi	%
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	67.400.000,00	67.400.000	100,00
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	23.400.000,00	23.400.000,00	100,00
Belanja Jasa yang Diberikan kepada Masyarakat	44.000.000,00	44.000.000,00	100,00

Hambatan dan Kendala Yang Ada Dalam PencapaianTarget

Hambatan dan kendala yang dialami oleh Satuan Kerja Perangkat Kecamatan Bika antara lain adalah:

- Keterbatasan ruang gerak kegiatan, karena dalam suasana pandemi Covid 19 yang hampir tak pernah usai, semoga suasana ini segera berakhir
- Keterbatasan sarana dan prasarana.
- Terbatasnya sumber dana untuk mendukung kegiatan pembangunan.

Hal ini berdampak pada target pencapaian kinerja, terutama belanja langsungnamun secara keseluruhan kegiatan dapat terlaksana.

BAB IV

KEBIJAKAN AKUNTANSI

4.1 Entitas Akuntansi / Entitas Pelaporan Keuangan Daerah

Entitas Pelaporan adalah OPD Kecamatan Bika yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut peraturan perundangan-undangan wajib menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban berupa Laporan OPD Kecamatan Bika. Laporan Keuangan terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (Laporan Perubahan SAL), Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Arus Kas (LAK), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) dan Catatan Laporan Keuangan (CALK)

Penyusunan Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2021 ini didasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua Pada Pemerintah Daerah dan berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan serta Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 53 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 48 Tahun 2018 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu.

4.2 Basis Akuntansi Yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan SKPD

Basis akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan ini adalah basis kas untuk pengakuan pendapatan, belanja dan pembiayaan dalam Laporan Realisasi Anggaran dan basis akrual untuk pengakuan aset, kewajiban dan ekuitas dana dalam neraca.

Basis kas dalam Laporan Realisasi Anggaran berarti bahwa pendapatan dan penerimaan pembiayaan diakui pada saat kas diterima oleh kas daerah, serta belanja dan pengeluaran pembiayaan diakui pada saat kas dikeluarkan dari kas daerah. Pemerintah Daerah tidak menggunakan istilah laba, melainkan menggunakan sisa perhitungan anggaran (lebih/kurang) untuk setiap tahun anggaran. Sisa perhitungan anggaran tergantung pada selisih realisasi penerimaan pendapatan dengan pengeluaran belanja dan pembiayaan.

Basis akrual dalam neraca berarti bahwa aset, kewajiban dan ekuitas dana diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi, atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah daerah dalam hal ini OPD Kecamatan Bika buka pada saat kas diterima atau dibayar oleh kas daerah.

Kantor Kecamatan Bika dalam menyajikan Laporan Keuangan untuk Program dan Kegiatan yang dilaksanakan telah mengaju pada standar Akuntansi Pemerintah, dimana laporan keuangan untuk pengakuan pendapatan, belanja dan pembiayaan menggunakan pencatatan yang berbasis kas yakni dicatat pada saat dimana suatu transaksi dilakukan atau terjadinya pengeluaran/penerimaan kas dan/atau untuk pemerintah atau pihak ketiga sedangkan untuk pengakuan aset, kewajiban dan ekuitas dana sistem pencatatan yang digunakan berbasis akrual yakni dicatat pada saat adanya pengakuan atas bukti transaksi yang dilakukan pada akhir tahun laporan.

4.2 Basis Pengukuran Yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan SKPD

Pengukuran / Penilaian atas aset dilakukan berdasarkan pengeluaran kas yang digunakan untuk memperoleh aset tersebut sampai siap digunakan.

Untuk belanja Pendapatan dan Belanja LRA masih diukur berdasarkan uang yang diterima dan dikeluarkan dari Kas Daerah, Pendapatan dan Beban LO diukur berdasarkan hak dan kewajiban yang timbul atas transaksi tersebut bukan semata-mata berdasarkan penerimaan dan Pengeluaran kas.

4.2.1 Kas

Kas dicatat sebesar nilai nominal. Nilai Nominal artinya disajikan sebesar nilai rupiahnya. Apabila terdapat kas dalam bentuk valuta asing, dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca. Dalam saldo kas juga termasuk penerimaan yang harus disetorkan kepihak ketiga berupa utang PFK

4.2.2 Piutang

Pengukuran Piutang Pendapatan adalah sebagai berikut :

4.2.2.1 Disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang ditetapkan berdasarkan surat ketetapan kurang bayar yang diterbitkan; atau

4.2.2.2 Disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang telah ditetapkan

terutang oleh Pengadilan Pajak untuk Wajib Pajak (WP) yang mengajukan banding; atau

4.2.2.3 Disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang masih proses banding atas keberatan dan belum ditetapkan oleh majelis tuntutan ganti rugi

4.2.2.4 Pengukuran piutang pendapatan diakui setelah diterbitkan surat tagihan dan dicatat sebesar nilai nominal yang tercantum dalam tagihan. Secara umum unsur utama piutang karena ketentuan perundang-undangan ini adalah potensi pendapatan. Artinya piutang ini terjadi karena pendapatan yang belum disetor ke kas daerah oleh wajib setor. Oleh karena setiap tagihan oleh pemerintah daerah wajib ada keputusan, maka jumlah piutang yang menjadi hak pemerintah daerah sebesar nilai yang tercantum dalam keputusan atas penagihan yang bersangkutan.

4.2.3 Investasi Jangka Pendek

Pengukuran Investasi Jangka Pendek :

4.2.3.1 Investasi dalam bentuk surat berharga :

Apabila terdapat nilai biaya perolehannya, maka dicatat sebesar biaya perolehan yang didalamnya mencakup harga investasi, komisi, jasa bank, dan biaya lainnya. Apabila tidak terdapat biaya perolehannya, maka dicatat sebesar nilai wajar atau harga pasarnya

4.2.3.2 Investasi dalam bentuk non saham dicatat sebesar nilai nominalnya, misalnya deposito berjangka waktu 6 bulan

4.2.4 Persediaan disajikan sebesar :

Biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian. Biaya perolehan persediaan meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya penanganan dan biaya lainnya yang secara langsung dapat dibebankan pada perolehan persediaan. Potongan harga, rabat, dan lainnya yang serupa mengurangi biaya perolehan. Harga pokok produksi apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri. Harga pokok produksi persediaan meliputi biaya langsung yang terkait dengan persediaan yang diproduksi dan biaya tidak langsung yang dialokasikan secara sistematis

Nilai Wajar, apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi. Harga nilai/wajar persediaan meliputi nilai tukar asset atau penyelesaian kewajiban antar pihak yang memahami dan berkeinginan melakukan transfer wajar

4.2.5 Tanah

Tanah diakui pertama kali sebesar biaya perolehan. Biaya perolehan mencakup harga pembelian atau biaya pembebasan tanah, biaya yang dikeluarkan dalam rangka memperoleh hak seperti biaya pengukuran sertifikat, biaya pematangan, pengukuran, penimbunan, dan biaya lainnya yang dikeluarkan sampai tanah tersebut siap pakai. Nilai tanah juga meliputi nilai bangunan tua yang akan dimusnahkan yang terletak pada tanah yang dibeli tersebut. Apabila perolehan tanah pemerintah daerah dilakukan oleh panitia pengadaan/pembebasan tanah, belanja barang dan belanja perjalanan dinas dalam rangka perolehan tanah tersebut.

4.2.6 Gedung dan Bangunan

Gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.

Pengakuan gedung dan bangunan dilakukan bila gedung dan bangunan telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan atau pada saat penguasaannya berpindah.

Pengeluaran setelah perolehan awal gedung dan bangunan yang memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomik di masa yang akan datang dalam bentuk kapasitas, mutu produksi atau peningkatan standar kinerja, harus ditambahkan pada nilai tercatat gedung dan bangunan yang bersangkutan.

Biaya perolehan gedung dan bangunan menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh gedung dan bangunan sampai siap pakai. Biaya ini antara lain meliputi harga pembelian atau biaya konstruksi, termasuk biaya pengurusan IMB, notaris, dan pajak.

Gedung dan bangunan yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah atau dihapuskan tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus dipindahkan ke pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.

Gedung dan bangunan dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian gedung dan bangunan dengan menggunakan biaya perolehan tidak

memungkinkan maka nilai gedung dan bangunan didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.

Biaya perolehan suatu gedung dan bangunan terdiri dari harga belinya atau konstruksinya, termasuk bea impor dan setiap biaya yang dapat diatribusikan secara langsung dalam membawa aset tersebut ke kondisi yang membuat aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan.

Biaya perolehan gedung dan bangunan yang dibangun dengan cara swakelola ditentukan menggunakan prinsip yang sama seperti aset yang dibeli.

Pengeluaran setelah perolehan awal gedung dan bangunan yang memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomik di masa yang akan datang dalam bentuk kapasitas, mutu produksi atau peningkatan standar kinerja, harus ditambahkan pada nilai tercatat gedung dan bangunan yang bersangkutan.

Apabila terjadi kondisi yang memungkinkan penilaian kembali, maka gedung dan bangunan akan disajikan dengan penyesuaian pada masing-masing akun gedung dan bangunan dan akun diinvestasikan dalam Aset Tetap.

Penilaian kembali atau revaluasi gedung dan bangunan dilakukan jika didasarkan pada ketentuan pemerintah yang berlaku secara nasional.

Gedung dan bangunan dieliminasi dari neraca ketika dilepaskan atau bila gedung dan bangunan secara permanen dihentikan penggunaannya dan tidak ada manfaat ekonomik masa yang akan datang.

Gedung dan bangunan yang secara permanen dihentikan atau dilepas harus dieliminasi dari Neraca dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Gedung dan bangunan yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus dipindahkan ke pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.

Laporan keuangan mengungkapkan gedung dan bangunan sebagai berikut:

- a. Dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai tercatat (*carrying amount*);
- b. Rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periode yang menunjukkan: Penambahan; Pelepasan atau penghapusan; perubahan nilai, jika ada; dan Mutasi aset tetap lainnya.

Gedung dan bangunan dinilai dengan biaya perolehan. Biaya perolehan gedung dan bangunan meliputi seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh gedung dan bangunan sampai siap pakai. Biaya ini antara lain meliputi harga pembelian atau biaya konstruksi, termasuk biaya pengurusan IMB, Notaris, dan Pajak. Apabila penilaian Gedung dan Bangunan dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar/taksiran pada saat perolehan.

4.2.7 Peralatan dan Mesin

Peralatan dan mesin mencakup mesin-mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, dan seluruh inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (duabelas) bulan dan dalam kondisi siap pakai. Pengakuan peralatan dan mesin dilakukan bila peralatan dan mesin telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan/atau pada saat penguasaannya berpindah. Pengeluaran setelah perolehan awal peralatan atau mesin yang memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomik di masa yang akan datang dalam bentuk kapasitas, mutu produksi atau peningkatan standar kinerja, harus ditambahkan pada nilai tercatat peralatan atau mesin yang bersangkutan. Biaya perolehan peralatan dan mesin menggambarkan jumlah pengeluaran yang telah dilakukan untuk memperoleh peralatan dan mesin tersebut sampai siap pakai. Biaya ini antara lain meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya instalasi, serta biaya langsung lainnya untuk memperoleh dan mempersiapkan sampai peralatan dan mesin tersebut siap digunakan. Peralatan dan mesin dieliminasi dari neraca ketika dilepaskan/dihapuskan atau bila peralatan dan mesin secara permanen dihentikan penggunaannya dan tidak ada manfaat ekonomik masa yang akan datang. Peralatan dan mesin yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah atau dihapuskan tetapi masih ada manfaat ekonomik masa yang akan datang tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus dipindahkan ke pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya. Peralatan dan mesin dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian peralatan dan mesin dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai peralatan dan mesin didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan. Biaya perolehan peralatan dan mesin terdiri dari harga belinya atau konstruksinya, termasuk bea impor dan setiap biaya yang dapat diatribusikan secara langsung dalam membawa peralatan dan mesin tersebut ke kondisi yang membuat peralatan dan mesin tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan.

Biaya administrasi dan biaya umum lainnya bukan merupakan suatu komponen biaya peralatan dan mesin sepanjang biaya tersebut tidak dapat diatribusikan secara langsung pada biaya perolehan peralatan dan mesin atau membawa peralatan dan mesin ke kondisi kerjanya. Pengeluaran setelah perolehan awal peralatan dan mesin yang memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomik di masa yang akan datang dalam bentuk kapasitas, mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja, harus ditambahkan pada nilai tercatat peralatan dan mesin yang bersangkutan. Apabila terjadi kondisi yang memungkinkan penilaian kembali, maka peralatan dan mesin akan disajikan dengan penyesuaian pada akun peralatan dan mesin dan akun diinvestasikan dalam Aset Tetap.

Laporan keuangan mengungkapkan Penambahan; Pelepasan/penghapusan; Perubahan nilai, jika ada; dan Mutasi peralatan dan mesin lainnya.

4.2.8 Jalan, Irigasi dan Jaringan

Jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh pemerintah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.

Pengakuan jalan, irigasi dan jaringan dilakukan bila Jalan, irigasi dan jaringan telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan atau pada saat penguasaannya berpindah.

Pengeluaran setelah perolehan awal jalan, irigasi dan jaringan yang memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomik di masa yang akan datang dalam bentuk kapasitas, mutu produksi atau peningkatan standar kinerja harus ditambahkan pada nilai tercatat jalan, irigasi dan jaringan yang bersangkutan.

Biaya perolehan jalan, irigasi, dan jaringan menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh jalan, irigasi, dan jaringan sampai siap pakai. Biaya ini meliputi biaya perolehan atau biaya konstruksi dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan sampai jalan, irigasi dan jaringan tersebut siap pakai.

Jalan, irigasi dan jaringan dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian jalan, irigasi dan jaringan dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai jalan, irigasi dan jaringan didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.

Pengeluaran setelah perolehan awal jalan, irigasi dan jaringan yang memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar memberi

manfaat ekonomik di masa yang akan datang dalam bentuk kapasitas, mutu produksi atau peningkatan standar kinerja, harus ditambahkan pada nilai tercatat jalan, irigasi dan jaringan yang bersangkutan.

Apabila terjadi kondisi yang memungkinkan penilaian kembali, maka jalan, irigasi dan jaringan akan disajikan dengan penyesuaian pada masing-masing akun jalan, irigasi dan jaringan dan akun diinvestasikan dalam Aset Tetap.

Jalan, irigasi dan jaringan dieliminasi dari neraca ketika dilepaskan atau bila jalan, irigasi dan jaringan secara permanen dihentikan penggunaannya dan tidak ada manfaat ekonomik masa yang akan datang.

Jalan, irigasi dan jaringan yang secara permanen dihentikan atau dilepas harus dieliminasi dari Neraca dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Jalan, irigasi dan jaringan yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus dipindahkan ke pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.

Laporan keuangan mengungkapkan jalan, irigasi dan jaringan sebagai berikut:

- a. Dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai tercatat (*carrying amount*);
- b. Rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periode yang menunjukkan Penambahan; Pelepasan atau penghapusan; Perubahan nilai, jika ada; Mutasi jalan, irigasi dan jaringan lainnya.

Jalan, Irigasi, dan Jaringan dinilai dengan biaya perolehan. Biaya perolehan jalan, irigasi dan jaringan meliputi seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh jalan, irigasi dan jaringan sampai siap pakai. Biaya ini meliputi biaya perolehan atau biaya konstruksi dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan sampai jalan, irigasi dan jaringan tersebut siap pakai.

4.2.9 Aset Tetap Lainnya

Aset Tetap Lainnya dinilai dengan biaya perolehan. Biaya perolehan Aset Tetap Lainnya (ATR) yang diperoleh melalui kontrak meliputi pengeluaran nilai kontrak, biaya perencanaan dan pengawasan, pajak, serta biaya perizinan. Biaya perolehan Aset Tetap Lainnya yang diadakan melalui swakelola, misalnya untuk Aset tetap Renovasi, meliputi biaya langsung dan tidak langsung, yang terdiri dari biaya bahan baku, tenaga kerja, sewa peralatan, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, pajak dan jasa konsultan.

4.2.10 Penyusutan Aset Tetap dan Amortisasi

Berdasarkan Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 53 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 48 Tahun 2018 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu, maka Aset Tetap disajikan berdasarkan biaya perolehan aset tetap tersebut dikurangi akumulasi penyusutan. Penyusutan Aset Tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset. Penyusutan Aset Tetap dilakukan untuk :

- 4.2.10.1** Menyajikan nilai Aset Tetap secara wajar sesuai dengan manfaat ekonomi aset dalam laporan keuangan pemerintah daerah
- 4.2.10.2** Mengetahui potensi Barang milik daerah dengan memperkirakan sisa masa manfaat suatu Barang milik daerah yang masih dapat diharapkan dapat diperoleh dalam beberapa tahun kedepan
- 4.2.10.3** Memberikan bentuk pendekatan yang lebih sistematis dan logis dalam menganggarkan belanja pemeliharaan/belanja modal untuk mengganti atau menambah aset tetap yang sudah dimiliki. Penyusutan dilakukan terhadap aset tetap berupa Gedung dan bangunan ; peralatan dan mesin ; jalan, irigasi dan jaringan ; Aset Tetap Lainnya berupa Aset Tetap Renovasi, alat musik modern dan alat olahraga

4.3 Penerapan Kebijakan Akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam Standar Akuntansi Pemerintah

Secara umum kebijakan akuntansi yang diterapkan pada pos-pos laporan keuangan telah sesuai dengan ketentuan Standar Akuntansi Pemerintahan. Pada tahun anggaran 2022, dilaksanakan penyusunan neraca awal Kecamatan Bika Kabupaten kapuas Hulu, seiring hal tersebut dilaksanakan penilaian kembali atas seluruh aset-aset tetap daerah kabupaten kapauas Hulu. Untuk pengadaan jenis aset yang masa perolehan/pengadaan setelah tahun anggaran 2022 penyajiannya telah berdasarkan biaya perolehan atau pertukaran (at cost), dan untuk pertama kali dilakukan penyusutan terhadap nilai buku per 31 Desember 2022 untuk Aset Tetap yang diperoleh sampai dengan 31 Desember 2021.

BAB V

PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN SKPD KECAMATAN BIKI

5.1 Penjelasan Laporan Realisasi Anggaran (LRA)

Laporan Realisasi Anggaran menyajikan ikhtisar sumber, alokasi dan penggunaan sumber daya ekonomi yang dikelola dalam satu periode pelaporan. Laporan Realisasi Anggaran menyajikan sekurang-kurangnya unsur-unsur sebagai berikut:

- 5.1.1 Pendapatan-LRA adalah penerimaan oleh entitas pemerintah melalui bendahara yang menambah SiLPA pada tahun anggaran yang bersangkutan, yang menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.
- 5.1.2 Belanja adalah pengeluaran oleh entitas pemerintah melalui bendahara yang mengurangi SiLPA pada tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak akan diperoleh kembali pembayarannya oleh pemerintah.
- 5.1.3 Transfer adalah penerimaan/pengeluaran uang oleh suatu entitas pelaporan dari/kepada entitas pelaporan lain, termasuk Dana Perimbangan dan Dana bagi Hasil.
- 5.1.4 Pembiayaan (financing) adalah setiap penerimaan/pengeluaran yang tidak berpengaruh pada kekayaan bersih entitas yang perlu dibayar kembali dan/atau akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun tahun anggaran berikutnya yang dalam anggaran pemerintah dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran.

Penerimaan pembiayaan antara lain dapat berasal dari pinjaman dan hasil divestasi sedang pengeluaran pembiayaan antara lain digunakan untuk pembayaran kembali pokok pinjaman, pemberian pinjaman pada entitas lain, dan penyertaan modal oleh pemerintah.

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya dalam satu periode pelaporan.

5.1.1 Pendapatan – LRA

Dengan memperhatikan sumber, sifat dan prosedur penerimaan pendapatan maka pengakuan pendapatan dapat diklasifikasikan kedalam beberapa alternatif:

- 5.1.1.1 Pengakuan pendapatan ketika pendapatan didahului dengan adanya penetapan terlebih dahulu, dimana dalam penetapan tersebut terdapat jumlah uang yang harus diserahkan kepada pemerintah daerah. Pendapatan ini diakui pada pendapatan LO ketika dokumen penetapan tersebut telah disahkan. Sedangkan untuk pendapatan LRA diakui ketika pembayaran telah dilakukan.
- 5.1.1.2 Pengakuan pendapatan ini terkait pendapatan pajak yang didahului dengan penghitungan sendiri oleh wajib pajak (self assessment) dan dilanjutkan dengan pembayaran oleh wajib pajak berdasarkan perhitungan tersebut. Selanjutnya, dilakukan pemeriksaan terhadap nilai pajak yang dibayar apakah sudah sesuai, kurang atau lebih bayar untuk kemudian dilakukan penetapan. Pendapatan ini diakui pada pendapatan LO dan Pendapatan LRA ketika wajib pajak melakukan pembayaran pajak. Dan apabila pada saat pemeriksaan ditemukan kurang bayar maka akan diterbitkan surat ketetapan kurang bayar yang akan dijadikan dasar pengakuan pendapatan LO. Sedangkan apabila dalam pemeriksaan ditemukan lebih bayar pajak maka akan diterbitkan surat ketetapan lebih bayar yang akan dijadikan pengurang pendapatan LO.
- 5.1.1.3 Pendapatan ini terkait pendapatan pajak yang pembayarannya dilakukan di muka oleh wajib pajak untuk memenuhi kewajiban selama beberapa periode ke depan. Pendapatan LO diakui ketika periode yang bersangkutan telah terlalui sedangkan pendapatan LRA diakui pada saat uang telah diterima.
- 5.1.1.4 Pengakuan pendapatan ini terkait pendapatan pajak yang didahului dengan penghitungan sendiri oleh wajib pajak (self assessment) dan pembayarannya diterima di muka untuk memenuhi kewajiban selama beberapa periode ke depan. Selanjutnya, dilakukan pemeriksaan terhadap nilai pajak yang dibayar apakah sudah sesuai, kurang atau lebih bayar, untuk selanjutnya dilakukan penetapan. Pendapatan LRA diakui ketika diterima pemerintah daerah. Sedangkan pendapatan LO diakui setelah diterbitkan penetapan berupa Surat Ketetapan (SK) atas pendapatan terkait.

- 5.1.1.5 Pengakuan pendapatan adalah pendapatan yang tidak perlu ada penetapan terlebih dahulu. Untuk pendapatan ini maka pengakuan pendapatan LO dan pengakuan pendapatan LRA pada saat pembayaran telah diterima oleh pemerintah daerah.

5.1.2 Belanja

Belanja merupakan semua pengeluaran oleh BUD atau pihak yang diberi kewenangan untuk melakukan pengeluaran Belanja, yang mengurangi Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Pemerintah Daerah. Dan kemudian Jenis Belanja dikelompokkan berdasarkan jenisnya, yaitu:

5.1.2.1 Belanja Operasi

Belanja operasi digunakan untuk menampung pengeluaran untuk kegiatan sehari-hari pemerintahan yang memberi manfaat jangka pendek. Termasuk belanja operasi di antaranya Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, Belanja Bunga, Belanja Subsidi, Belanja Hibah, Belanja Bantuan Sosial.

5.1.2.2 Belanja Modal

Belanja Modal digunakan untuk menampung pengeluaran untuk perolehan Aset tetap dan Aset lainnya yang memiliki manfaat jangka panjang atau lebih dari 1 (satu) periode anggaran. Termasuk belanja modal yaitu belanja modal tanah, belanja modal peralatan dan mesin, belanja modal gedung dan bangunan, belanja modal jalan, irigasi, dan jaringan, belanja modal konstruksi dalam pengerjaan, belanja modal aset tetap lainnya, dan belanja modal aset lainnya.

5.1.2.3 Belanja Tak Terduga

Belanja tak terduga menampung pengeluaran untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa dan tidak diharapkan berulang termasuk pengeluaran tidak terduga yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan Pemerintah Daerah.

Satuan Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Bika sesuai dengan fungsinya tidak mengelola pendapatan akan tetapi mengelola belanja terdiri dari :

- **Belanja Pegawai**

Belanja Pegawai yang digunakan untuk pembayaran gaji, Honor dan tunjangan, dengan anggaran Rp. **1.045.544.640,00** sedangkan realisasi sebesar Rp.**1.050.801.982,00** atau **100,30%** dan belanja sebagai berikut:

No	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	%
1	Belanja Gaji Pokok PNS	470.753.890,00	469.272.500,00	99,69
2	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	58.563.553,00	58.406.466,00	99,73
3	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	57.374.500,00	57.130.000,00	99,57
4	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	7.657.250,00	7.630.000,00	99,64
5	Belanja Tunjangan Beras PNS	28.493.649,00	28.388.640,00	99,63
6	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	1.236.228,00	1.253.690,00	101,41
7	Belanja Pembulatan Gaji PNS	4.201,00	4.157,00	98,95
8	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	30.555.090,00	30.312.010,00	99,20
9	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	974.780,00	971.225,00	99,64
10	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	2.924.359,00	2.913.694,00	99,64
11	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	254.087.140,00	261.599.600,00	102,96
12	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	132.920.000,00	132.920.000,00	100,00
	Jumlah	1.045.544.640,00	1.050.801.982,00	100,30

- **Belanja Barang dan Jasa**

Belanja barang dan jasa digunakan untuk operasional guna menunjang kelancaran tugas dan fungsi Kecamatan Bika pada program pelayanan administrasi perkantoran dengan anggaran Rp.**532.381.520,00** realisasi Rp.**531.824.648,00** atau sebesar **99,90%** rincian belanja adalah sebagai berikut :

No	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	%
1	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	8.600.000,00	8.590.000,00	99,88
2	Belanja Bahan-Isi Tabung Gas	1.815.000,00	1.800.000,00	99,17
3	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	12.300.000,00	12.300.000,00	100,00
4	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	40.484.400,00	40.484.400,00	100,00
5	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	36.438.800,00	36.438.800,00	100,00
6	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	3.450.000,00	3.450.000,00	100,00

7	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	4.110.000,00	4.110.000,00	100,00
8	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	11.377.800,00	11.377.800,00	100,00
9	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	32.936.000,00	32.936.000,00	100,00
10	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	15.224.000,00	15.224.000,00	100,00
11	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	6.340.000,00	6.340.000,00	100,00
12	Belanja Pakaian Batik Tradisional	7.200.000,00	7.200.000,00	100,00
13	Belanja Pakaian Olahraga	6.600.000,00	6.600.000,00	100,00
14	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	2.950.000,00	2.950.000,00	100,00
15	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	148.800.000,00	148.800.000,00	100,00
16	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	1.800.000,00	1.800.000,00	100,00
17	Belanja Tagihan Air	2.400.000,00	2.400.000,00	100,00
18	Belanja Tagihan Listrik	4.200.000,00	3.869.008,00	92,12
19	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	5.952.000,00	5.952.000,00	100,00
20	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	357.120,00	267.840,00	75,00
21	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	446.400,00	334.800,00	75,00
22	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	134.600.000,00	134.600.000,00	100,00
23	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	-	-	-
24	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Masyarakat	44.000.000,00	44.000.000,00	100,00
Belanja Barang dan Jasa		532.381.520,00	531.824.648,00	99,90

5.2 Penjelasan Neraca

5.2.1 Aset Lancar

5.2.1.1. Kas Bendahara Pengeluaran

Saldo kas yang ada pada bendahara pengeluaran Kecamatan Bika Kabupaten kapuas Hulu per 31 Desember 2022 dan 2021 senilai Rp. 00,00,-

5.2.1.2. Persediaan

Saldo persediaan pada Kecamatan Bika kapuas Hulu per 31 desember 2022 terdiri dari persediaan Rp.00,00

5.2.2 Aset Tetap

5.2.2.1. Tanah

Saldo aset tetap tanah per 31 desember 2022 sebesar Rp.307.115.000,00 dan per 31 desember 2021 sebesar Rp. 307.115.000,00

5.2.2.2. Peralatan dan Mesin**Aset Tetap Peralatan dan Mesin- Alat-alat Berat**

- Saldo aset tetap alat berat per 31 desember 2022 adalah sebesar Rp.00,00- saldo alat-alat berat per 31 desember 2021 adalah Rp. 00,00,-

Aset Tetap Peralatan dan Mesin - Alat-alat Angkutan

- Saldo aset tetap alat Alat-alat Angkutan per 31 desember 2021 adalah sebesar Rp. 271.224.753,18 terdapat penambahan nilai asset pada tahun 2022 dari mutase masuk sebesar Rp.17.310.434,00 yaitu: Sepeda Motor Yahama tahun 2016 1 unit atas nama Pengguna an.Hambali, S.A.P.,M.A.P dari BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH. Kemudian terdapat mutase keluar sebesar (Rp.21.300.000,00) yaitu : SEPEDA MOTOR Honda Vario tahun 2015 1 unit atas nama Pengguna a.n. Drs. HERMANUS SUSANTO, M.Si ke SEKRETARIAT DAERAH maka saldo akhir tahun 2022 sebesar Rp.267.235.187,18

Aset Tetap Peralatan dan Mesin - Alat Bengkel dan alat ukur

- Saldo aset tetap Alat-alat Bengkel dan alat ukur per 31 Desember 2022 senilai Rp. 00,00 dan saldo akhir per 31 desember 2021 senilai Rp.00,00

Aset Tetap Peralatan dan Mesin - Alat Pertanian dan Peternakan

- Saldo Aset tetap Alat Pertanian dan Peternakan tahun 2022 senilai Rp.00,00 dan pada tahun 2021 senilai Rp.00,00

Aset Tetap Peralatan dan Mesin - Alat-alat Kantor dan Rumah Tangga

- Saldo aset tetap Alat-alat Kantor dan Rumah Tangga tahun 2021 Rp.146.011.122,73 dan saldo akhir pada tahun 2022 sebesar Rp.146.011.122,73

Aset Tetap Peralatan dan Mesin - Komputer

- Saldo aset tetap Komputer pada tahun 2021 sebesar Rp. 72981435,73 dan pada tahun 2022 terdapat mutase keluar sebesar (Rp.8.000.000,00) yaitu : 1 unit Lap Top ASUS tahun 2021 atas nama Pengguna an.Drs.Hermanus Susanto,M.Si ke Sekretariat Daerah sehingga saldo akhir tahun 2022 sebesar Rp.64.981.435,73

Aset Tetap Peralatan dan Mesin - Alat Studio dan Alat Komunikasi

- Saldo aset tetap Alat Studio dan Alat Komunikasi pada tahun 2021 Rp.56.672.673,27 dan pada tahun 2022 sebesar Rp.56.672.673,27

Aset Tetap Peralatan dan Mesin - Alat-alat Kedokteran

- Saldo aset tetap Alat-alat Kedokteran pada tahun 2021 dengan nilai Rp.00,00 dan pada tahun 2022 Rp.00,00

Aset Tetap Peralatan dan Mesin - Alat Laboratorium

- Saldo aset tetap Alat Laboratorium pada tahun 2021 Rp. 1.500.000,00 dan pada tahun 2022 Rp.1.500.000,00

Aset Tetap Peralatan dan Mesin - Alat Rambu-rambu

- Saldo aset tetap Alat Rambu-rambu pada tahun 2021 Rp.00,00 sedangkan pada tahun 2022 Rp.00,00

Aset Tetap Peralatan dan Mesin - Alat Peraga

Saldo aset tetap Alat Peraga pada tahun 2021 Rp.00,00 sedangkan pada tahun 2022 Rp.00,00

Aset Tetap Peralatan dan Mesin - Alat Keamanan

Saldo aset tetap Alat Keamanan pada tahun 2021 Rp.00,00 dan pada tahun 2022 saldo akhir Rp.00,00

5.2.2.3. Gedung dan Bangunan**Bangunan Gedung**

- Saldo aset tetap bangunan gedung pada tahun 2021 dengan nilai Rp.1.631.322.241,84 sedangkan pada tahun 2022 terdapat penambahan dai mutase masuk sebesar Rp.907.985.190,02 dari dinas PUPR dengan rincian: Bangunan Gedung Pertemuan Semi Permanen tahun 2019 Rehabilitasi Gedung Serba Guna Kantor Camat Bika 1 Unit. Sehingga saldo akhir tahun 2022 sebesar Rp.2.539.307.431,86

Bangunan Monumen

- Saldo aset tetap Bangunan Monumen pada tahun 2021 Rp.00,00 dan pada tahun 2022 dengan nilai Rp.00,00

5.2.2.4. Jalan, Irigasi dan Jaringan**Jalan, Irigasi dan Jaringan - Jalan dan Jembatan**

- Saldo aset tetap Jalan dan Jembatan pada tahun 2021 Rp.1.523.560.394,93 dan pada tahun 2022 Rp.1.523.560.394,93

Jalan, Irigasi dan Jaringan - Bangunan Air (Irigasi)

- Saldo aset tetap Bangunan Air (Irigasi) pada tahun 2021 Rp.54.653.239,05 dan pada tahun 2022 Rp.54.653.239,05

Jalan, Irigasi dan Jaringan- Instalasi

- Saldo aset tetap Instalasi pada tahun 2021 Rp.00,00 dan pada tahun 2022 Rp.00,00 tidak ada penambahan dan pengurangan

Jalan, Irigasi dan Jaringan-Jaringan

- Saldo aset tetap Jaringan pada tahun 2021 Rp.00,00 dan pada tahun 2022 Rp.00,00

5.2.2.5. Aset Tetap Lainnya**Aset Tetap Lainnya- Buku dan Perpustakaan**

- Saldo aset tetap Buku dan Perpustakaan pada tahun 2021 Rp. 00,00 dan pada tahun 2022 Rp.00,00 tidak terdapat penambahan

Aset Tetap Lainnya-Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan

- Saldo aset tetap Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan pada tahun 2021 Rp.00,00 dan pada tahun 2022 Rp.00,00

Aset Tetap Lainnya- Hewan / Ternak dan Tanaman

- Saldo aset tetap Hewan / Ternak dan Tanaman pada tahun 2021 Rp.00,00 dan pada tahun 2022 Rp.00,00

5.2.2.6. Konstruksi Dalam Pengerjaan**Konstruksi Dalam Pengerjaan**

- Saldo aset tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan pada tahun 2021 Rp.00,00 dan pada tahun 2022 Rp.00,00

5.2.2.7. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

- Saldo **Akumulasi Penyusutan Aset Tetap** tahun 2021 dengan nilai (Rp.2.418.267.971,86) dan pada tahun 2022 terdapat penambahan

sebesar (Rp.166.346.198,43) sehingga nilai akumulasi penyusutan tahun 2022 sebesar (Rp.2.584.614.170,29) adapun rincian adalah sebagai berikut :

1. Akumulasi penyusutan Alat Angkutan

Tahun 2021	(Rp.257.071.287,53)
Tahun 2022	(Rp.258.878.114,84)
Selisih/Kurang	(Rp. 1.806.827,31)

2. Akumulasi penyusutan Alat Kantor dan Rumah Tangga

Tahun 2021	(Rp.106.080.856,56)
Tahun 2022	(Rp.121.955.593,60)
Selisih/Kurang	(Rp. 15.874.737,04)

3. Akumulasi penyusutan Alat studio dan Komunikasi dan Pemancar

Tahun 2021	(Rp. 36.961.069,31)
Tahun 2022	(Rp. 42.955.603,96)
Selisih/Kurang	(Rp. 5.994.534,65)

4. Akumulasi penyusutan Alat Laboratorium

Tahun 2020	(Rp.1.500.000,00)
Tahun 2021	(Rp.1.500.000,00)
Selisih/Kurang	Rp. 00,00

5. Akumulasi penyusutan Komputer

Tahun 2021	(Rp. 46.100.076,28)
Tahun 2022	(Rp. 53.315.380,69)
Selisih/Kurang	(Rp. 7.215.304,41)

6. Akumulasi penyusutan Bangunan Gedung

Tahun 2021	(Rp.456.637.271,41)
Tahun 2022	(Rp. 571.518.434,46)
Selisih/Kurang	(Rp.114.881.163,05)

7. Akumulasi penyusutan Jalan dan Jembatan

Tahun 2021	(Rp. 1.504.079.827,74)
Tahun 2022	(Rp. 1.523.560.394,93)
Selisih/Kurang	(Rp. 19.480.567,19)

8.	Akumulasi penyusutan Bangunan Air
Tahun 2021	(Rp. 9.837.583,03)
Tahun 2022	(Rp. 10.930.647,81)
Selisih/Kurang	(Rp. 1.093.064,78)

5.2.2.8. ASET LAINNYA

Tagihan Penjualan Angsuran

- Kecamatan Bika Tidak terdapat asset lainnya Tagihan Penjualan Angsuran

Tagihan Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah

- Kecamatan Bika Tidak terdapat asset lainnya Tagihan Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah

Kemitraan Dengan Pihak Ketiga

- Kecamatan Bika Tidak terdapat asset lainnya Kemitraan Dengan Pihak Ketiga

Aset Tak Berwujud

- Kecamatan Bika Tidak terdapat asset lainnya terdapat Aset Tak Berwujud

Amortisasi Aset Tak Berwujud

- Kecamatan Bika Tidak terdapat asset lainnya Amortisasi Aset Tak Berwujud

Aset Lain-Lain

- Saldo aset tetap aset lain-lain pada tahun 2021 Rp.77.888.101,77 dan pada tahun 2022 sebesar Rp.77.888.101,77

Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain

- Kecamatan Bika memiliki akumulasi penyusutan aset lain-lain sebesar (Rp.77.888.101,77)

5.2.3 Kewajiban

5.2.3.1 KEWAJIBAN JANGKA PENDEK

Utang Peruntukan Pada Pihak Ketiga (PFK)

- Kecamatan Bika Tidak terdapat Kewajiban Jangka Pendek Utang Peruntukan Pada Pihak Ketiga (PFK)

Pendapatan Diterima Dimuka/Pendapatan Yang Ditangguhkan

- Kecamatan Bika Tidak terdapat Kewajiban Pendapatan Diterima Dimuka/Pendapatan Yang Ditangguhkan

Utang Belanja

- Kecamatan Bika memiliki Kewajiban Utang Belanja pada Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS BULAN Desember 2022 sebesar (Rp.25.812.000,00)

Utang Jangka Pendek Lainnya

- Kecamatan Bika Tidak terdapat Kewajiban Utang Jangka Pendek Lainnya

5.2.3.2 KEWAJIBAN JANGKA PANJANG**Utang Dalam Negeri**

- Kecamatan Bika Tidak Memiliki Kewajiban Jangka Panjang Utang Dalam Negeri

Utang Luar Negeri

- Kecamatan Bika Tidak memiliki kewajiban jangka panjang Utang Luar Negeri

Utang Jangka Panjang Lainnya

- Kecamatan Bika Tidak memiliki kewajiban jangka panjang utang jangka panjang lainnya

5.2.4 Ekuitas Dana

Ekuitas Dana per 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp.1.646.772.888,86 sedangkan pada tahun 2022 Rp. 2.376.422.314,45

5.3 Penjelasan Laporan Operasional

5.3.1 Pendapatan LO

Tidak terdapat pendapatan pada Kantor Kecamatan Bika per 31 Desember 2022.

5.3.2 Beban

Rincian beban pada Kantor Kecamatan Bika per 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut:

5.3.3.1. Beban Pegawai

No	URAIAN	REALISASI
1	Belanja Gaji Pokok PNS	469.272.500,00
2	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	58.406.466,00
3	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	57.130.000,00
4	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	7.630.000,00
5	Belanja Tunjangan Beras PNS	28.388.640,00
6	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	1.253.690,00
7	Belanja Pembulatan Gaji PNS	4.157,00
8	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	30.312.010,00
9	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	971.225,00
10	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	2.913.694,00
11	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	287.411.600,00
12	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	132.920.000,00
	Beban Pegawai	1.076.613.982,00

5.3.3.2. Beban Persediaan

No	Uraian	Beban Persediaan
1	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	1.350.000,00
2	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	2.980.000,00
3	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	1.500.000,00
4	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	3.370.000,00
5	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	4.110.000,00
6	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	20.926.400,00
7	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	6.340.000,00
8	Belanja Pakaian Batik Tradisional	7.200.000,00
9	Belanja Pakaian Olahraga	6.600.000,00
10	Belanja Bahan-Isi Tabung Gas	1.800.000,00
11	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	11.377.800,00
12	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	53.000,00
13	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	17.580.800,00
14	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	27.984.000,00
15	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	15.224.000,00
16	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	3.450.000,00
17	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	14.820.000,00
18	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	11.145.600,00
19	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	8.590.000,00
20	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	12.300.000,00
21	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	1.835.000,00
22	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	1.362.400,00
23	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	4.952.000,00
	Jumlah	186.851.000,00

5.3.3.3. Beban Jasa

No	URAIAN	Beban Jasa
1	Belanja Tagihan Air	1.706.600,00
2	Belanja Tagihan Listrik	3.869.008,00
3	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	148.800.000,00
4	Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	5.952.000,00
5	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	267.840,00
6	Belanja luran Jaminan Kematian bagi Non ASN	334.800,00
7	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	1.800.000,00
8	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	2.950.000,00
	Jumlah	165.680.248,00

5.3.3.4. Beban Perjalanan Dinas

No	URAIAN	Beban Perjalanan Dinas
1	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	80.550.000,00
2	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	30.650.000,00
3	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	23.400.000,00
	Jumlah Beban Perjalanan Dinas	134.600.000,00

5.3.3.5. Beban Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga

No	URAIAN	Beban Diserahkan pada Pihak Ketiga
1	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	44.000.000,00
	Jumlah	44.000.000,00

5.3.3.6. Beban Penyusutan

- Saldo Beban Penyusutan Aset Tetap tahun 2021 dengan nilai Rp.118.561.430,43 dan pada tahun 2022 terdapat kenaikan sebesar Rp.39.832,64 sehingga nilai Beban penyusutan tahun 2022 senilai Rp.118.601.263,07 adapun rincian adalah sebagai berikut :
 1. Beban penyusutan Alat Angkutan
 - Tahun 2022 Rp. 8.269.312,45
 - Tahun 2021 Rp. 13.496.393,31
 - Selisih/Kurang (Rp. 5.227.080,86)

2. Beban penyusutan Alat Kantor dan Rumah Tangga

Tahun 2022	Rp. 15.874.737,04
Tahun 2021	Rp. 17.324.737,04
Selisih/Kurang	(Rp. 1.450.000,00)

3. Beban penyusutan Alat studio dan Komunikasi dan Pemancar

Tahun 2022	Rp. 5.994.534,65
Tahun 2021	Rp. 5.994.534,65
Selisih/Kurang	Rp.00,00

4. Beban penyusutan Alat Laboratorium

Tahun 2022	Rp.00,00
Tahun 2021	Rp.00,00
Selisih/Kurang	Rp. 00,00

5. Beban penyusutan Komputer

Tahun 2022	Rp. 8.815.304,41
Tahun 2021	Rp. 10.415.304,41
Selisih/Kurang	(Rp.1.600.000,00)

6. Beban penyusutan Bangunan Gedung

Tahun 2022	Rp. 59.073.742,55
Tahun 2021	Rp. 40.471.269,05
Selisih/Kurang	Rp.18.602.473,50

7. Beban penyusutan Jalan dan Jembatan

Tahun 2022	Rp. 19.480.567,19
Tahun 2021	Rp. 29.766.127,19
Selisih/Kurang	(Rp. 10.285.560,00)

8. Beban penyusutan Bangunan Air

Tahun 2022	Rp. 1.093.064,78
Tahun 2021	Rp. 1.093.064,78
Selisih/Kurang	Rp. 00,00

5.3. Laporan Perubahan Ekuitas

5.3.1. Ekuitas awal

Ekuitas akhir Neraca Tahun 2021 merupakan Ekuitas Awal Tahun 2022 sebesar Rp.1.646.079.488,86 yang terdiri dari Aset Lancar, Aset Tetap dan Aset Lainnya setelah memperhitungkan Penyusutan dan Amortisasi Aset. Maka ekuitas akhir tahun 2022 Rp.2.350.610.314,45

5.3.2. Surplus/Defisit LO

Merupakan defisit antara Pendapatan LO dan Beban LO Kecamatan Bika Per 31 Desember 2021 sebesar Rp. (Rp.13.681.451.180,43) sedangkan di tahun 2022 sebesar (Rp.1.726.346.493,07)

5.3.3. Dampak Perubahan Kebijakan Akuntansi

Dampak kumulatif akibat Perubahan Kebijakan Akuntansi yang mempengaruhi ekuitas Kecamatan Bika Kabupaten Kapuas Hulu Per 31 Desember 2022 adalah

- **Penyesuaian Kas Bendahara**

Kecamatan Bika tidak terdapat Pengeluaran

- **Koreksi Nilai Persediaan**

Kecamatan Bika tidak terdapat Koreksi Nilai Persediaan

- **Koreksi Aset Tetap**

Kecamatan Bika terdapat Koreksi aset tetap sebesar Rp.895.995.624,02 akibat dari mutasi masuk sebesar Rp.925.295.624,02 ditambah mutasi keluar sebesar (Rp.29.300.000,00)

- **Koreksi Aset Lainnya**

Kecamatan Bika tidak terdapat Koreksi Aset Lainnya

- **Koreksi Penyusutan**

Kecamatan Bika tidak terdapat Koreksi Penyusutan sebesar (Rp47.744.935,36)

- **RK-PPKD**

pada Kecamatan Bika yang harus dieliminasi per 31 desember 2021 adalah sebesar Rp.1.289.336.350,00 dan 2022 sebesar Rp.1.582.626.630,00

- **EKUITAS AKHIR**

Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah pada tanggal laporan. Saldo Ekuitas berasal dari Ekuitas awal ditambah (dikurang) oleh Surplus/Defisit LO dan perubahan lainnya seperti koreksi nilai persediaan, selisih evaluasi Aset Tetap, dan lain-lain. pada Kecamatan Bika per 31 desember 2021 adalah sebesar Rp.1.646.079.488,86 dan 2022 sebesar Rp.2.350.610.314,45

BAB VII PENUTUP

Laporan keuangan Kecamatan Bika disusun berpedoman pada Standar Akuntansi Pemerintah sebagai bentuk pertanggungjawaban Keuangan Pemerintah Kecamatan Bika sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik dalam penyajian, penilaian, pengalokasian, pengukuran maupun pengungkapan pos-pos dalam laporan keuangan tersebut. Laporan Keuangan ini merupakan hasil dari proses konsolidasi terhadap laporan Keuangan yang dipercayakan pada entitas-entitas akuntansi tersebut.

Laporan Keuangan ini menggambarkan Kinerja Keuangan Pemerintah Kecamatan Bika Tahun Anggaran 2022 , untuk mewujudkan prinsip transparansi dalam pertanggungjawaban pengelolaan Keuangan daerah sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-Undang agar dapat dijadikan dasar dalam Pengambilan Keputusan dan penetapan kebijakan oleh pihak-pihak yang berkepentingan, baik dari pihak eksekutif, legislatif maupun pihak lainnya.

Bika, 31 Desember 2022

CAMAT BIKA



PAULINUS TOTONG, S.Sos., M.A.P
NIP : 19820827 200902 1 003